

Budaya Politik Organisasi

By Feni Rosalia

WORD COUNT

2419

TIME SUBMITTED

24-JUN-2020 08:58AM

PAPER ID

60482066

Feni Rosalia

Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung

feni.rosalia@fisip.unila.ac.id

ABSTRAK

Setiap organisasi pasti memiliki budaya organisasi, termasuk budaya politik. Budaya politik organisasi pemerintah adalah pengetahuan, kepercayaan, cara pandang, kebiasaan, dan lain-lain dalam hubungannya dengan nilai-nilai dan orientasi politik yang diyakini oleh seluruh anggota organisasi pemerintah terhadap kehidupan bermegara, penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintahan, hukum, adat istiadat, dan norma kebiasaan. Budaya politik organisasi pemerintah akan mempengaruhi sikap, nilai, dan orientasi organisasi pemerintah dalam bekerja, khususnya berkaitan dengan hakikat politik dalam organisasi, yaitu aktivitas untuk mendapatkan, mengembangkan, dan menggunakan kekuasaan. Berdasarkan hal tersebut tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui lebih jauh tentang budaya politik organisasi pemerintah.

Penulisan ini menggunakan metode deskriptif, berdasarkan pada fenomena sosial dan masalah manusia. Penulis membuat suatu gambaran melalui kata-kata dan membuat tulisan berdasarkan pada situasi obyek tulisan dan kajian teori.

Budaya politik organisasi pemerintah terdapat dalam penyelenggaraan roda pemerintahan. Organisasi pemerintah melakukan budaya politik yang terus menerus sehingga membuat tatanan baru dalam suatu sistem politik. Budaya politik organisasi pemerintah tidak terlepas dari adanya kepentingan-kepentingan dari organisasi pemerintah dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemerintahan. Dalam organisasi pemerintah dapat terjadi politik organisasi dengan mengatas-namakan budaya organisasi. Adanya tindakan yang tidak secara resmi disetujui oleh suatu organisasi untuk mempengaruhi orang lain guna mencapai tujuan. Keberpihakan terhadap pihak tertentu tetapi dengan mengatasnamakan budaya kebersamaan dan persatuan sehingga hal tersebut dianggap sebuah kewajiban, walaupun kenyataannya tidak semua anggota organisasi menyetujui hal tersebut. Budaya politik dalam organisasi pemerintah masih diwarnai oleh paternalisme, parokhialisme, mempunyai orientasi yang kuat terhadap kekuasaan, dan patrimonialisme yang masih berkembang dengan sangat kuat. Hal ini karena adopsi sistem politik hanya menyentuh pada dimensi struktur dan fungsi-politiknya (yang biasanya diwujudkan dalam konstitusi), namun tidak pada semangat budaya yang melingkupi pendirian sistem politik tersebut. Budaya politik organisasi pemerintah banyak ditandai oleh penerimaan dengan keterpaksaan oleh anggota organisasi, lebih tertutup, dan masih mengikuti budaya paternalisme. Hal tersebut terjadi akibat adanya sistem yang mengikat setiap organisasi pemerintah, karena organisasi pemerintah secara formal tidak berdiri sendiri, antara lain dalam pengisian jabatan-jabatan terutama jabatan struktural sangat bergantung pada organisasi pemerintah di atasnya yang pada umumnya bukan mengacu pada prinsip-prinsip kualitas dan profesionalitas tetapi pada hubungan kedekatan, kesamaan afiliasi, dan adanya kepentingan-kepentingan pribadi.

Kata kunci : budaya, organisasi, politik, pemerintah

PENDAHULUAN

Pada dasarnya setiap organisasi berusaha untuk menentukan dan membentuk sesuatu yang dapat dijadikan sebagai identitas organisasi, sebagai pedoman bagi anggota organisasi

dalam beraktivitas, serta dapat memotivasi anggota organisasi untuk bersama-sama beraktivitas dalam mencapai tujuan organisasi. Sesuatu yang dimaksud tersebut tidak lain adalah budaya, yaitu keseluruhan pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan serta kebiasaan lain yang dilakukan manusia sebagai anggota masyarakat. Budaya memberikan pedoman bagaimana anggota organisasi bertindak atau berperilaku dalam upaya mencapai tujuan bersama. Budaya datang dari penyerapan beberapa hal, dapat berbentuk pembelajaran, sehingga anggota organisasi terbiasa melakukan hal-hal tersebut yang pada gilirannya anggota organisasi menganggap yang dia lakukan adalah sesuatu yang memang harus dilakukan. Kegiatan yang terus menerus itulah kemudian menjadi budaya kerja bagi anggota organisasi. Budaya kerja akan terus ada dalam setiap organisasi, dan munculnya budaya kerja dalam organisasi karena dorongan anggota organisasi untuk terus memperbaiki diri dan keinginan untuk mencapai tujuan organisasi yang semakin memuaskan.

Demikian juga dengan organisasi pemerintah, berusaha mempunyai sesuatu yang dapat menjadi penciri organisasi pemerintah dalam menjalankan peran dan fungsi pemerintah untuk antara lain melaksanakan kegiatan pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Budaya dalam organisasi pemerintah merupakan kesepakatan bersama tentang nilai-nilai bersama dalam kehidupan organisasi pemerintah dan mengikat semua orang (Siagian, 1995). Karena itu budaya organisasi pemerintah akan menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh para anggota organisasi, menentukan batas-batas normatif perilaku anggota organisasi, menentukan sifat dan bentuk-bentuk pengendalian dan pengawasan organisasi, menentukan gaya manajerial yang dapat diterima para anggota organisasi, menentukan cara-cara yang tepat, dan sebagainya. Peran penting budaya organisasi pemerintah adalah membantu menciptakan rasa memiliki terhadap organisasi, menciptakan jati diri para anggota organisasi, menciptakan keterikatan emosional antara organisasi dan pegawai yang terlibat di dalamnya, membantu terciptanya stabilitas organisasi sebagai sistem sosial, dan menemukan pola pedoman perilaku sebagai hasil dari norma-norma kebiasaan yang terbentuk dalam keseharian.

Unsur-unsur dalam organisasi pemerintah secara umum meliputi hirarki jabatan, personalitas, dan model struktur jabatan. Perbedaan antar organisasi pemerintah dapat ditelusuri melalui penyelidikan atas budaya politik yang berkembang (Basri, 2012). Budaya politik adalah sikap individu terhadap sistem politik dan komponen-komponennya, dan sikap individu terhadap peranan yang dapat dimainkan dalam sebuah sistem politik (Almond dan Verba, dalam Gaffar, 2006 : 99). Setiap organisasi pemerintah tidak luput dari budaya, termasuk budaya politik. Adanya budaya politik dalam organisasi pemerintah sangat mempengaruhi sikap, nilai, dan orientasi organisasi pemerintah dalam bekerja. Adanya budaya politik dalam organisasi pemerintah dapat mempengaruhi perilaku orang-orang yang ada dalam organisasi, khususnya berkaitan dengan hakikat politik dalam organisasi, yaitu aktivitas untuk mendapatkan, mengembangkan, dan menggunakan kekuasaan. Setiap organisasi pemerintah, baik langsung ataupun tidak langsung pasti bersinggungan dengan praktik-praktik politik. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik membahas tentang budaya politik organisasi pemerintah.

KAJIAN TEORI

Budaya berasal dari kata sansekerta *buddayah*, yang merupakan bentuk jamak dari *buddhi*, yang berarti budi atau akal. Dengan demikian, budaya berarti hal-hal yang bersangkutan dengan akal. Adapun ahli antropologi yang merumuskan definisi tentang budaya secara sistematis dan ilmiah adalah Taylor, yang menulis dalam bukunya —*Primitive Culture*, bahwa budaya adalah keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung

8 ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan lain, serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat (Ranjabar, 2006 : 10). Organisasi menciptakan, menemukan, dan mengembangkan sebuah pola dan asumsi dasar yang dikenal dengan budaya organisasi, berguna sebagai pedoman organisasi untuk secara internal mengelola integrasi anggota organisasi dan secara eksternal bermanfaat untuk beradaptasi dengan lingkungan eksternal, masing-masing anggota organisasi harus memahami nilai-nilai yang ada dan bagaimana mereka harus bertingkah laku. Konsep budaya organisasi menurut Robbins (2006 : 721) yaitu sistem makna bersama yang dianut anggota organisasi yang membedakan satu organisasi dengan organisasi lainnya.

Dalam arti luas pemerintah didefinisikan sebagai suatu bentuk organisasi yang bekerja dengan tugas menjalankan suatu sistem pemerintahan. Dalam tulisan ini organisasi pemerintah dilihat sebagai tatanan sejumlah organisasi yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan. Dalam pelaksanaannya sebagaimana organisasi pada umumnya, maka organisasi pemerintah juga dipengaruhi dan mempengaruhi budaya dalam organisasinya, termasuk budaya politik, bahkan menurut Basri (2012 : 24) perbedaan antar organisasi pemerintah dapat ditelusuri melalui penyelidikan atas budaya politik yang berkembang. Studi yang mempunyai hubungan dekat dengan kekuasaan dalam organisasi adalah politik.

3 Budaya politik menurut Kantaprawira (2006 : 25) adalah pola perilaku individu dan orientasinya dalam kehidupan bernegara, penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintahan, hukum, adat istiadat, dan norma kebiasaan yang dihayati oleh seluruh anggota masyarakat setiap harinya. David Easton (Winarno, 2008:15) menyatakan bahwa budaya politik adalah aspek yang sangat signifikan dalam sistem politik. Hal ini karena bekerjanya struktur dan fungsi politik dalam suatu sistem politik sangat ditentukan oleh budaya politik yang melingkupinya. Budaya politik organisasi pemerintah adalah pengetahuan, kepercayaan, cara pandang, kebiasaan, dan lain-lain dalam hubungannya dengan nilai-nilai dan orientasi politik yang diyakini oleh seluruh anggota organisasi pemerintah terhadap kehidupan bernegara, penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintahan, hukum, adat istiadat, dan norma kebiasaan.

PEMBAHASAN

2 Organisasi pemerintah selalu didukung oleh tiga unsur yang saling berhubungan, yaitu manusia, kerjasama, dan tujuan bersama. Dari ketiganya, faktor manusia memegang peranan penting. Agar organisasi dapat mencapai tujuan bersama dan mampu menguasai masa depan, maka setiap sumber daya manusia harus dikondisikan sedemikian rupa sehingga mereka dapat bekerja dengan efisien. Karena itulah dalam organisasi diperlukan budaya yang akan merubah cara kerja lama atau tradisional yang menghambat kemajuan, menjadi cara kerja baru dan mendorong sumber daya manusia untuk bekerja lebih optimal dan efisien. Begitu pula dalam menyikapi berbagai fenomena politik yang terjadi, di satu sisi persoalan-persoalan politik dapat mempengaruhi budaya politik yang memang sudah terbangun dalam organisasi pemerintah, namun di sisi lain persoalan-persoalan politik tersebut dapat membangun sebuah budaya politik baru bagi organisasi pemerintah.

Budaya politik organisasi pemerintah terdapat dalam penyelenggaraan roda pemerintahan. Dalam hal ini organisasi pemerintah juga melakukan politik untuk mendapatkan kelebihan dan keuntungan dalam menjalankan tugas sebagai eksekutif. Organisasi pemerintah melakukan budaya politik yang terus menerus sehingga membuat tatanan baru dalam suatu sistem politik. Dengan melakukan budaya politik maka organisasi pemerintah juga berperan dalam penyelenggaraan suatu sistem politik di mana organisasi pemerintah menjadi subyek. Budaya politik organisasi pemerintah tidak terlepas dari adanya kepentingan-kepentingan dari organisasi pemerintah dalam menjalankan tugasnya sebagai

penyelenggara pemerintahan. Politik yang dilakukan organisasi pemerintahan sangat erat kaitannya dengan tugas-tugas suatu organisasi pemerintahan.

Dalam organisasi pemerintah dapat terjadi politik organisasi dengan mengatas-namakan budaya organisasi. Adanya tindakan yang tidak secara resmi disetujui oleh suatu organisasi untuk mempengaruhi orang lain guna mencapai tujuan. Keberpihakan terhadap pihak tertentu tetapi dengan mengatasnamakan budaya kebersamaan dan persatuan sehingga hal tersebut dianggap sebuah kewajiban, walaupun kenyataannya tidak semua anggota organisasi menyetujui hal tersebut. Artinya bisa saja sebenarnya anggota organisasi setuju dengan budayanya namun tidak setuju terhadap pemberlakuan budaya dalam kasus keberpihakan pada pihak tertentu. Sebagai catatan bahwa jika anggota organisasi terpapar berbudaya politik yang partisipatif, maka politik organisasi sebagaimana di atas dapat tidak berlaku, mengingat bagi anggota organisasi yang dominan berbudaya partisipatif mereka sudah memiliki kesadaran politik yang tinggi. Perilaku anggota menganggap dirinya sebagai individu yang mempunyai kebebasan untuk memilih dan menentukan pilihan politiknya dalam segala aspek kehidupan.

Beberapa faktor dan peristiwa/fenomena politik yang mempengaruhi dan dipengaruhi budaya politik organisasi pemerintah antara lain :

1. Penerapan sistem politik sentralistik dan hegemonik;
Melalui sistem politik sentralistik dan hegemonik, negara cenderung telah mengembangkan model kebijakan dan sistem organisasi pemerintah yang mengarah pada penyeragaman di hampir semua aspek kebijakan. Dalam kondisi demikian, variasi-variasi dan keanekaragaman budaya lokal yang mewarnai sistem organisasi pemerintah di berbagai daerah menjadi hilang. Varian lokal dalam organisasi pemerintah berubah menjadi keseragaman budaya dengan ciri terjadinya sentralisasi kebijakan, pengambilan keputusan, ritual, etos kerja, sampai model hubungan organisasi pemerintah dengan masyarakatnya.
2. Netralitas dan profesionalitas organisasi pemerintah belum berjalan;
Netralitas dan profesionalitas organisasi pemerintahan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang, bahwa secara normative organisasi pemerintah harus bebas dari yang namanya politik, organisasi pemerintahan harus bersikap netral dan profesional demi tercapainya tujuan diadakannya organisasi pemerintahan yang salah satunya adalah menciptakan aturan, memerintah, dan mensejahterakan seluruh masyarakat yang ada. Banyak kasus di mana netralitas aparat pemerintah dipengaruhi peristiwa politik. Aparat pemerintah tidak netral dalam peristiwa politik, misalnya saat pemilihan kepala daerah di mana aparat memaksakan kehendak kepada anggota organisasi dalam menentukan pilihannya. Banyak pejabat membuat budaya organisasi Karena adanya kepentingan politik. Budaya organisasi yang baik menjadi buruk Karena ada beberapa pejabat yang terkadang mencari perhatian lebih dengan memomorduakan profesionalitas dan integritasnya demi mendapatkan sebuah jabatan atau kekuasaan dalam organisasi pemerintah. Pejabat terjun dan masuk dalam proses penyelenggaraan politik dengan mendukung para elit politik. Akibat ketidak-netralan tersebut jika pada awalnya telah tercipta budaya organisasi yang mendukung ke arah netralisme dan profesional aparat, mengakibatkan budaya organisasi menjadi kabur dan memaksa anggota untuk tidak mengikuti budaya tersebut.
3. Perilaku politik dalam organisasi tidak positif.
Disadari atau tidak terdapat beberapa perilaku politik yang mempengaruhi budaya politik organisasi pemerintah. Perilaku pertama, adalah perilaku untuk mempengaruhi di luar

sistem formal atau bersifat ilegal, dan sering kali bersifat sembunyi-sembunyi. Perilaku kedua, dirancang untuk menguntungkan seseorang atau kelompok tertentu dengan mengorbankan kepentingan organisasi. Dan ketiga, perilaku dirancang untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan, dapat melalui cara-cara yang bersifat memecah belah dan pertentangan/konflik.

Mengubah budaya politik terutama di organisasi pemerintah bukan hal mudah, karena yang diubah bukan hanya dari aspek kognitif seperti tidak memahami menjadi memahami. Tetapi budaya politik menyangkut nilai, sikap dan keyakinan. Mengubah idealisme harus datang dari dalam diri manusia, bagaimana seseorang menyadari dan menerima nilai, sikap dan keyakinan yang benar-benar datang dari dalam dirinya. Hal tersebut diperparah dengan sistem politik dan sistem pemerintahan yang hanya mengumbar prinsip-prinsip pemerintahan yang baik tetapi dalam pelaksanaannya jauh panggang dari api. Dengan demikian penulis setuju dengan kajian Winarno (2008:66-70) bahwa budaya politik dalam organisasi pemerintah tidak membawa perubahan yang signifikan, karena masih diwarnai oleh paternalisme, parokhialisme, mempunyai orientasi yang kuat terhadap kekuasaan, dan patrimonialisme yang masih berkembang dengan sangat kuat. Hal ini karena adopsi sistem politik hanya menyentuh pada dimensi struktur dan fungsi-fungsi politiknya (yang biasanya diwujudkan dalam konstitusi), namun tidak pada semangat budaya yang melingkupi pendirian sistem politik tersebut.

Perlu pula kita cermati perbedaan budaya politik dari organisasi pemerintah dan swasta. Budaya politik di organisasi swasta lebih berjalan lancar dalam arti budaya politiknya lebih terbuka, menjunjung kebebasan dengan tidak menggunakan kedok budaya yang pura-pura, dan terbentuknya budaya politik dalam organisasi berjalan alamiah tanpa dipaksakan. Sebaliknya budaya politik di organisasi pemerintah banyak ditandai oleh penerimaan dengan keterpaksaan oleh anggota organisasi, lebih tertutup, dan masih mengikuti budaya paternalisme. Hal tersebut terjadi akibat adanya sistem yang mengikat setiap organisasi pemerintah, karena organisasi pemerintah secara formal tidak berdiri sendiri, antara lain dalam pengisian jabatan-jabatan terutama jabatan struktural sangat bergantung pada organisasi pemerintah di atasnya yang pada umumnya bukan mengacu pada prinsip-prinsip kualitas dan profesionalitas tetapi pada hubungan kedekatan, kesamaan afiliasi, adanya kepentingan-kepentingan pribadi, dan sebagainya.

KESIMPULAN

Budaya organisasi Pemerintah Daerah tidak terlepas dari faktor politik, disebut juga dengan istilah budaya yang dipolitisasi. Hal tersebut terjadi akibat sistem politik yang sentralistik-hegemonik, netralitas dan profesionalitas organisasi pemerintah belum berjalan, serta perilaku politik dalam organisasi tidak positif. Organisasi pemerintah daerah terdiri dari berbagai individu dan kelompok dengan nilai-nilai, tujuan, dan kepentingan yang berbeda. Kondisi ini memunculkan potensi bagi perbedaan dalam memahami dan melaksanakan budaya organisasi dari masing-masing individu dan kelompok tersebut karena berkaitan juga dengan alokasi sumber-sumber yang terbatas.

Budaya politik tidak bermain di aspek kognitif saja, sehingga pendalaman budaya tidak sekedar dari pengetahuan dan pemahaman, tetapi lebih penting adalah setiap anggota organisasi pemerintah meyakini ide, nilai-nilai, kepercayaan, dan lain-lain yang datang dari dalam diri individu sehingga pelaksanaan budaya adalah dengan kesadaran tanpa keterpaksaan. Operasionalisasi internalisasi budaya politik kepada anggota organisasi pemerintah inilah yang tidak mudah karena adanya budaya yang dipolitisasi sebagaimana di atas.

DAFTAR PUSTAKA

- Basri, Seta. 2012. *Potret Indonesia : Genealogi, Dinamika, Integrasi*. Jakarta : PT Leutica Nouvalita.
- Gaffar, Affan. 2006. *Politik Indonesia : Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Kantaprawira, Rusadi. 2006. *Sistem Politik Indonesia : Suatu Model Pengantar*. Bandung : Sinar Baru Algensindo.
- Ranjabar, Jacobus. 2006. *Sistem Sosial Budaya Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung : Ghalia Indonesia.
- Robbins, Stephen P. 2006. *Perilaku Organisasi*. Jakarta : Erlangga.
- Winarno, 2008. *Sistem Politik Indonesia Era Reformasi*. Yogyakarta : MedPress.

Budaya Politik Organisasi

ORIGINALITY REPORT

28%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

1	empimuslion.wordpress.com Internet	97 words — 4%
2	journal.uny.ac.id Internet	70 words — 3%
3	www.kajianpustaka.com Internet	54 words — 2%
4	autofecundationdb4pr.blogspot.com Internet	45 words — 2%
5	lib.unnes.ac.id Internet	45 words — 2%
6	es.scribd.com Internet	38 words — 2%
7	ahmadfatihin.blogspot.com Internet	36 words — 1%
8	jurnal.umrah.ac.id Internet	34 words — 1%
9	abstrak.ta.uns.ac.id Internet	32 words — 1%
10	jurnalmahasiswa.unesa.ac.id Internet	32 words — 1%
11	repository.unpas.ac.id Internet	26 words — 1%

12	docplayer.info Internet	26 words — 1%
13	gilangarfians.blogspot.com Internet	21 words — 1%
14	satrioarismunandar6.blogspot.com Internet	19 words — 1%
15	id.scribd.com Internet	18 words — 1%
16	www.slideshare.net Internet	17 words — 1%
17	petrussamo.wordpress.com Internet	14 words — 1%
18	ayuchipit23.blogspot.com Internet	13 words — 1%
19	dandyfebrianto12.blogspot.com Internet	12 words — < 1%
20	Sumartono Sumartono. "BUDAYA POLITIK DALAM MASYARAKAT PRAGMATIS", LUGAS Jurnal Komunikasi, 2018 Crossref	12 words — < 1%
21	exaudian.wordpress.com Internet	9 words — < 1%
22	wahyoecyber.blogspot.com Internet	8 words — < 1%
23	repository.uinjkt.ac.id Internet	8 words — < 1%
24	ejournal.upi.edu Internet	8 words — < 1%

EXCLUDE QUOTES

ON

EXCLUDE MATCHES

OFF

EXCLUDE
BIBLIOGRAPHY

ON